



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO ORGANISASI

Padang, 2018

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- 1. NAMA ORGANISASI** Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 2. TUGAS** Menyiapkan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tatalaksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.
- 3. FUNGSI**
- Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
 - Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
 - Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.
 - Pengelolaan pengelolaan kepegawaian sekretariat daerah.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	Manual IKU terlampir
2	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-Undangan Kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai Perundang-Undangan Kelembagaan	Manual IKU terlampir

3	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	Manual IKU terlampir
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Manual IKU terlampir

Padang, Desember 2018

KEPALA BIRO ORGANISASI


IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680415 198902 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KELEMBAGAAN

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN /FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	<p>Terwujudnya Penataan OPD yang tepat Fungsi dan Tepat Ukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Penataan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran <p>Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan 	<p>Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan</p>	<p>Persentase tugas pokok dan fungsi SKPD yang tidak tumpang tindih = 8,16%</p>	<p>Besaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditentukan berdasarkan Variabel, Variable dan Indikator dari masing-masing urusan</p> <p>Besaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditentukan berdasarkan Variabel, Variable dan Indikator dari masing-masing urusan.</p>	<p>BAGIAN KELEMBAGAAN</p>

Padang, Desember 2018
KEPALA BIRO ORGANISASI



IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19680415 198902 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN /FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	<p>Terwujudnya Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi <p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 	<p>Nilai Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi</p> <p>Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A</p>	<p>Jumlah OPD 2</p>	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan.</p> <p>Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas OPD</p>	<p>BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA</p>

Padang, Desember 2018
KEPALA BIRO ORGANISASI



IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19680415 198902 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KETATALAKSANAAN

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN /FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	<p>Terwujudnya Pelayanan Prima Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik <p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik 	<p>Rata-rata IKM</p> <p>Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan</p>	<p>Jumlah 10 Inovasi</p>	<p>Data dan Informasi yang digunakan untuk mengetahui jumlah inovasi yang diciptakan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk terwujudnya Pelayanan Publik yang prima</p> <p>Inovasi Pelayanan Publik adalah suatu cara atau sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat.</p>	BAGIAN KETATALAKSANAAN
2	<p>Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Tata Kelola Organisasi <p>Meningkatnya Kinerja Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Tata Kelola Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi - Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 	<p>Nilai evaluasi akuntabilitas CC</p>	<p>Evaluasi akuntabilitas kinerja Biro Organisasi capaian realisasi fisik dan anggaran sesuai yang direncanakan dalam bentuk program/kegiatan sebagai upaya peningkatan Tata kelola organisasi yang baik</p> <p>Evaluasi akuntabilitas kinerja Biro Organisasi capaian realisasi fisik dan anggaran sesuai yang direncanakan dalam bentuk program/kegiatan sebagai upaya peningkatan Tata kelola organisasi yang baik.</p>	

Padang, Desember 2018
KEPALA BIRO ORGANISASI


IRWAN, Sos, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19680415 198902 1 001